

DAYA SAING, KINERJA PERDAGANGAN, DAN DAMPAK LIBERALISASI PRODUK KEHUTANAN

Competitiveness, Trade Performance, and Liberalization Impact of Forestry Product

Adrian Lubis

Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI,

Jl. M. I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat, adrian.lubis@kemendag.go.id

Naskah diterima: 15 Januari 2013

Disetujui diterbitkan: 11 Juli 2013

Abstrak

Produk kehutanan Indonesia telah diliberalisasi sejak tahun 2007, namun kinerja perdagangannya belum membaik. Hal ini terlihat dari 127 pos tarif produk yang dibina Kementerian Kehutanan, hanya 34 pos tarif yang mengalami surplus perdagangan, 62 pos tarif mengalami defisit. Sebanyak 13 pos tarif dari 62 pos tarif yang defisit merupakan bahan baku yang banyak digunakan oleh industri kehutanan nasional. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Intra-Industry Trade dan Indeks Spesialisasi Perdagangan, serta hasil simulasi yang menggunakan GTAP GMig2, produk kehutanan yang memiliki daya saing tinggi adalah *Pulp of Wood*, jauh diatas daya saing produk *Paper and Paper Board* serta *Woods and Article of Wood*. Keterbatasan bahan baku menjadi penyebab utama gagalnya Indonesia untuk memanfaatkan liberalisasi perdagangan. Sebanyak 34 pos tarif yang surplus semenjak liberalisasi sebaiknya tetap diliberalisasi dan dijadikan produk ekspor utama. Adapun 13 pos tarif yang menjadi bahan baku utama industri nasional, meskipun mengalami defisit, sebaiknya tetap diliberalisasi. Sebanyak 49 pos tarif yang defisit dan tidak menjadi bahan baku utama sebaiknya diberlakukan *trade remedies* dan dijadikan produk sensitif.

Kata Kunci : Dampak Liberalisasi, Daya Saing, Kinerja Perdagangan

Abstract

Since 2007 the forestry product has been liberalized, but its trading performance has not improved yet. From 127 product tariff lines fostered by the Ministry of Forestry, there are only 34 lines which gained trade surplus and 62 lines which experienced trade deficit. Out of 62 products tariff lines which experienced trade deficit, 13 products are raw materials which are widely used by forest industry. Based on the Intra-Industry Trade and Trade Specialization Indexes, as well as simulation results using the GTAP GMig 2, forestry product with high competitiveness is Pulp of Wood, far above the competitiveness of Paper and Paper Board and Woods and Articles of Wood. The limited availability of raw materials is the main cause of Indonesia's failure to take advantage of trade liberalization. The 34 product tariff lines which experienced surpluses should remain liberalized and become the main export products. Although experiencing deficits, the 13 product tariff lines which are the main raw materials for the industrial sector should be continually liberalized, while the remaining 49 product tariff lines which are not key raw materials should be provided with trade remedies and they should be considered as sensitive products.

Keywords : Competitiveness, Trade Performance, Liberalization Impact

JEL Classification: F13, F17, F18

PENDAHULUAN

Indonesia telah melakukan kesepakatan liberalisasi perdagangan semenjak berlakunya perjanjian liberalisasi ASEAN-Republik Korea di tahun 2007. Selanjutnya, telah terjadi secara berturut-turut, liberalisasi Indonesia dengan Jepang di tahun 2008, dengan negara ASEAN di tahun 2009, dengan Cina di tahun 2010, dan saat ini menunggu proses ratifikasi untuk liberalisasi regional antara ASEAN-Jepang, ASEAN-Australia-Selandia Baru dan ASEAN-India.

Sektor kehutanan sebagai salah satu industri utama di Indonesia tidak terlepas dari dampak akibat liberalisasi tersebut. Liberalisasi perdagangan pada mulanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja perdagangan, khususnya ekspor, yang selanjutnya diharapkan mendorong peningkatan produksi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja dalam industri kehutanan. Namun sayangnya, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Liberalisasi perdagangan yang dilakukan melalui berbagai bentuk *Free Trade Agreement* (FTA) antara Indonesia dan mitra dagangnya sejak tahun 2007 ternyata belum berhasil meningkatkan kinerja perdagangan produk kehutanan, khususnya kelompok *Woods and article of wood atau Harmonized System* (HS) 44. Nilai ekspor produk HS 44 ke dunia turun sebesar 13,86% per tahun selama tahun 2000-2011. Nilai ekspor Indonesia ke dunia di tahun 2000 mencapai USD 4.678,32 juta, lalu turun menjadi USD 3.151,09 juta di tahun 2011. Turunnya kinerja ekspor Indonesia disebabkan terutama oleh hilangnya pasar di Jepang, Uni Eropa,

Amerika Serikat, Republik Korea, dan Cina. Adapun pasar tujuan ekspor yang mengalami peningkatan adalah negara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru. Namun sayangnya peningkatan ekspor ke wilayah tersebut tidak dapat menutupi hilangnya pasar di negara tujuan ekspor lainnya.

Sebaliknya dalam kinerja impor nasional, terjadi peningkatan impor yang luar biasa, mencapai 50,32% per tahun. Pertumbuhan impor yang sangat tinggi tersebut didorong oleh peningkatan impor untuk produk HS 44 dari ASEAN, Cina dan Uni Eropa. Produk impor tersebut umumnya masuk sebagai bahan baku, sebagaimana contoh kasus impor dari Cina sebagian besar terdiri dari *wood sawn or chipped* (HS 4407), *fuel wood* (HS 4401) dan *wood charcoal* (HS 4402).

Kenaikan kinerja ekspor produk *pulp of wood* (HS 47) dan *paper and paper board* (HS 48) dari Indonesia ke dunia selama tahun 2000-2011 telah terlihat, antara lain dengan pertumbuhan ekspor produk bubur kertas dan kertas yang mencapai 21,72% per tahun. Namun impor produk tersebut naik sebesar 40,30% per tahun, paling banyak berasal dari Cina dan ASEAN. Pertumbuhan impor yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekspor kembali membuktikan kegagalan Indonesia dalam memanfaatkan liberalisasi untuk meningkatkan surplus perdagangan produk bubur kertas dan kertas nasional.

Terkait dengan ketersediaan bahan baku, industri kehutanan nasional dan pemerintah sepakat untuk memenuhinya dengan produk hutan lestari. Indonesia saat ini sudah memiliki sertifikasi yang

dapat memenuhi kriteria hutan lestari tersebut dengan memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Adapun latar belakang kebijakan tersebut adalah a) maraknya kegiatan *illegal logging* dan *illegal trading*, b) perlunya perbaikan tata kelola hutan di Indonesia, c) tren dalam perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas, d) rendahnya daya saing produk Indonesia, dan e) perlunya *positioning* Indonesia dalam perdagangan global (Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, 2012).

Pencapaian SVLK tersebut tidak terlepas dari kemampuan Indonesia dalam menyediakan bahan baku kayu dari hutan lestari. Saat ini produksi hutan lestari diperkirakan sebesar 25-30 juta m³ per tahun, jauh dibawah kebutuhan industri kayu nasional yang mencapai 50-60 juta m³ per tahun. Jika produksi hutan tanaman dapat terus ditingkatkan seperti yang ditargetkan, diprediksikan baru di tahun 2020 produksi nasional dapat menyamai konsumsi kayu nasional saat ini (Departemen Kehutanan dan ITTO, 2005).

Studi ini menganalisis kinerja produk kehutanan semenjak liberalisasi dan merumuskan usulan kebijakan untuk meningkatkan surplus perdagangan produk kehutanan. Kajian ini diharapkan memberikan informasi dampak liberalisasi dan usulan posisi runding produk kehutanan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Model keseimbangan umum mengalami evolusi yang panjang dari teori ekonomi, matematika ekonomi dan teknik komputasi. Fondasi teoritis dari

model ini adalah Hukum Walras. Aplikasi secara numerik dan empiris dari model keseimbangan umum disebut model *Applied General Equilibrium* (AGE) atau model *Computable General Equilibrium* (CGE) (Sugiyono, 2009).

Model *Global Trade Analysis Project* (GTAP) adalah model standar dengan banyak negara dan banyak komoditas dengan mengaplikasikan model ekonomi keseimbangan umum. Pada model GTAP secara eksplisit dilakukan pemodelan pada margin transportasi internasional. Suatu global bank juga dibentuk dalam model sebagai intermediasi dari investasi dan tabungan dunia. Sistem permintaan konsumen diduga dengan menggunakan *Constant Difference of Elasticities* (CDE) untuk menangkap kepekaan terhadap perbedaan harga dan pendapatan antar negara (Hertel, *et al*, 1997).

Selain itu, aliran barang dalam perdagangan internasional mengikuti model *Armington* (1969) dimana setiap produk dibedakan berdasarkan asal negara. Setiap barang diasumsikan substitusi yang tidak sempurna satu sama lainnya untuk komoditas yang diproduksi didalam negeri. Dengan asumsi ini, model dapat menangkap aliran perdagangan antar dua negara. Kelemahan model ini adalah mengasumsikan sistem pasar persaingan sempurna dan skala usaha yang konstan pada aktivitas produksi. Hertel (1997) mengakui bahwa pada konteks negara kecil dan terbuka, asumsi pasar persaingan sempurna mengakibatkan simulasi dampak penurunan tarif menjadi lebih besar dari yang sesungguhnya.

Chirativat (2002) dan Park *et.al* (2008) menemukan bahwa persiapan

menghadapi liberalisasi merupakan kunci keberhasilan peningkatan kinerja industri dan perekonomian dalam menghadapi liberalisasi. Sebagai kasus, liberalisasi ACFTA terbukti meningkatkan kinerja perdagangan antara kedua Negara. Namun karena Cina jauh lebih siap dengan daya saing lebih tinggi, pertumbuhan kinerja ekspor Cina jauh lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN.

Sementara itu, temuan awal dari Kementerian Perdagangan (2012) mengungkapkan bahwa liberalisasi ACFTA memberikan peluang peningkatan ekspor dan investasi dari Cina. Hal ini perlu diikuti pengamanan pasar domestik, peningkatan daya saing global, dan penguatan ekspor melalui pelatihan dan investasi untuk meningkatkan nilai tambah (Lubis *et.al.*, 2011). Berbeda dengan itu adalah temuan dari Kementerian Perindustrian (2011), yang mengungkapkan bahwa liberalisasi ACFTA berdampak buruk terhadap kinerja beberapa industri nasional, salah satunya adalah kinerja sektor elektronik, dan terdapat indikasi *dumping* untuk beberapa produk tertentu.

Berkaitan dengan kebijakan perdagangan dan industrialisasi yang diambil oleh suatu negara maka secara garis besar hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu kebijakan substitusi impor atau ekspansi ekspor. Substitusi impor sering dikaitkan dengan kebijakan proteksi dan ekspansi ekspor berhubungan dengan kebijakan liberalisasi. Ogujiuba, Nwogwugwu, dan Dike (2011) mengungkapkan bahwa Industrialisasi

Substitusi Impor (ISI) merupakan *learning process*. Fase substitusi impor merupakan basis pengembangan teknologi dan bisnis internasional. Negara-negara Asia Timur, seperti Korea Selatan dan Taiwan, dianggap berhasil memberlakukan kebijakan ini dan menggunakannya untuk meningkatkan kompetensi teknologi industri.

Senada dengan hal tersebut, temuan Kim, J.K., D.S. Sang, dan I.K. Jun (1995), mengungkapkan bahwa mulai tahun 1962 Pemerintah Republik Korea lebih memilih untuk mengadopsi strategi promosi ekspor dibandingkan kebijakan substitusi impor. Pemerintah memberikan dukungan yang sangat besar bagi perusahaan eksportir dengan memberikan berbagai insentif, termasuk perlakuan istimewa dalam alokasi kredit dan pajak. Hal serupa diungkapkan oleh Harvie dan Lee (2003) yang menyatakan bahwa transformasi dan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang mengesankan selama periode 1962-1989 didorong oleh adopsi pertumbuhan ekonomi dan strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor.

METODE PENELITIAN

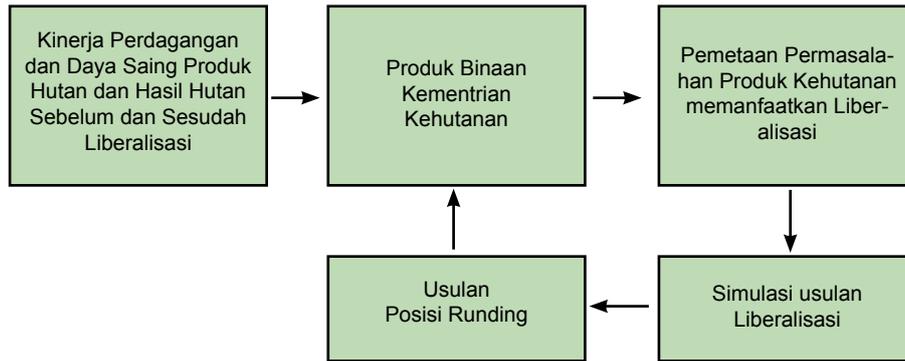
Metode Analisis

Studi ini menggunakan tiga metode yaitu dua indeks daya saing yang meliputi Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) dan Indeks Grubel Lloyd, serta model keseimbangan umum (*general equilibrium*) dengan menggunakan GTAP versi *Global Migration* (GMig)2. Indeks Spesialisasi Perdagangan dan *Grubel Lloyd* memberikan informasi perubahan daya saing sebelum dan setelah liberalisasi (Lubis *et.al.*, 2011).

Berdasarkan daya saing produk tersebut dapat diusulkan posisi runding untuk liberalisasi perdagangan.

Analisis dalam tulisan ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, seperti yang dijelaskan dalam Gambar 1. Pertama dilakukan analisis kinerja perdagangan

dan daya saing dari produk kehutanan dan hasil hutan yang termasuk kelompok HS 44, HS 47, dan HS 48. Selanjutnya dilakukan analisis khusus untuk produk kehutanan dan hasil hutan yang merupakan binaan Kementerian Kehutanan.



Gambar 1. Analisis dan Simulasi Produk Kehutanan

Kemudian dipetakan kemampuan produk kehutanan dalam memanfaatkan liberalisasi khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor. Terakhir dilakukansimulasiuntukmemprediksikan kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perdagangan produk dan hasil hutan serta usulan posisi runding yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut.

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP)

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) digunakan untuk menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu produk. Indeks SpesialisasiPerdagangan ini dapat menggambarkan apakah untuk suatu jenis produk, Indonesia cenderung menjadi negara eksportir atau importir. Secara matematika, ISP dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ISP = \frac{(X_{ia} - M_{ia})}{(X_{ia} + M_{ia})}$$

dimana X dan M masing-masing adalah ekspor dan impor, serta i dan a masing-masing adalah barang jenis i dan negara a.

Secara implisit, indeks ini mempertimbangkan sisi permintaan dan sisi penawaran, dimana ekspor identik dengan suplai domestik dan impor adalah permintaan domestik dan selanjutnya ekspor terjadi apabila ada kelebihan atas barang tersebut di

pasar domestik. Indeks Spesialisasi Perdagangan merupakan indikator untuk mengetahui pola perdagangan dan pentahapan industrialisasi suatu komoditas berdasarkan periode, sehingga kinerja komoditas tersebut dapat diukur. Adapun tahap-tahap perkembangan komoditas berdasarkan ISP adalah :

1. Tahap Pengenalan; suatu produk dapat diperkenalkan kedalam suatu negara melalui impor, konsumsi domestik berkembang perlahan dan produk domestik masih sederhana, ditandai Angka ISP -1 sampai -0,5 (catatan nilai ISP -1 artinya semua produk di impor, belum ada ekspor).
2. Tahap Substitusi Impor; produk domestik mulai menggantikan barang-barang impor, nilai impor mulai berkurang, ekspor mulai meningkat, nilai ISP -0.5 sampai 0 (catatan: nilai ISP = 0 berarti sudah seimbang impor dengan ekspor komoditas).
3. Tahap Perluasan Ekspor, pada tahap ini persaingan ekspor menjadi lebih ketat, angka ISP berkisar antara 0 sampai 0,8.

4. Tahap Pematangan/Pendewasaan; pada tahap ini ekspor mempunyai daya saing tinggi, ditandai dengan nilai ISP 0,8 sampai 1 (catatan bila nilai ISP = 1 berarti tidak ada impor untuk komoditas tersebut) (Kementerian Perdagangan, 2012).

Intra-Industry Trade (IIT Indeks)

Untuk menggambarkan keterkaitan perdagangan kedua negara digunakan *Intra Industry Trade Index* (IIT Indeks) yang menggambarkan tingkat integrasi perdagangan suatu produk dalam suatu kawasan tertentu. Nilai IIT indeks yang tinggi menunjukkan adanya keterkaitan yang bersifat dua arah (*two-way trade*) dimana Indonesia melakukan ekspor dan juga impor produk industri tertentu. Nilai IIT yang cenderung semakin menurun menunjukkan keterkaitan perdagangan yang ada cenderung bersifat satu arah dan Indonesia cenderung lebih menjadi importir (Lubis *et.al.*, 2011).

IT indeks yang umum digunakan adalah Grubel-Lloyd *Index* dengan rumus:

$$IIT = \frac{\sum(X+M) - \sum|X-M|}{\sum(X+M)} \times 100 \quad \text{atau} \quad 1 - \frac{\sum|X-M|}{\sum(X+M)} \times 100$$

dimana:

X = ekspor

M = impor

Global Trade Analysis Project (GTAP)

Simulasi dilakukan dengan menggunakan model keseimbangan

umum GTAP versi GMig2. Untuk keperluan ini, dilakukan agregasi produk sesuai standar GTAP GMig2 yang dibangun oleh Walmsley, *et.al.*, 2007, dan

dilakukan simulasi berupa penghapusan tarif antara Indonesia dengan negara mitra FTA. Selanjutnya akan dipetakan hambatan selain tarif yang dihadapi eksportir domestik di pasar mitra utama, serta hambatan yang dihadapi di pasar alternatif (*emerging market*).

Simulasi kebijakan yang digunakan bertujuan untuk melihat dampak liberalisasi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional. Adapun dampak liberalisasi tersebut yang dianalisis mencakup dampak liberalisasi terhadap perubahan kesejahteraan, indeks volume dan indeks harga pendapatan nasional (GDP), perubahan *output* nasional, perubahan impor, perubahan ekspor, perubahan surplus perdagangan dan permintaan tenaga kerja terlatih maupun tidak terlatih.

Simulasi dilakukan dengan merujuk perkembangan liberalisasi saat ini yaitu

minat Indonesia untuk ikut serta dalam liberalisasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang terdiri dari liberalisasi antara ASEAN, Australia, Cina, Jepang, Republik Korea, dan Selandia Baru. Liberalisasi ini merupakan pengembangan liberalisasi ASEAN plus mitra yang terdiri dari liberalisasi antara ASEAN dengan Australia, Cina, Jepang, Republik Korea, dan Selandia Baru. Salah satu usulan utama dalam liberalisasi tersebut adalah penghapusan tarif untuk 95% pos tarif dan peningkatan investasi dengan tujuan peningkatan teknologi dan nilai tambah.

Adapun beberapa persamaan yang relevan dengan hasil yang ditampilkan sebagai berikut (Hertel, 1997):

Trade Balance (DTBALi)

Adapun persamaan tersebut dirumuskan dengan :

$$DTBALi(i,r) = [VXW(i,r) / 100] * vxwfob(i,r) - [VIW(i,r) / 100] * viwcif(i,r)$$

Persamaan ini menunjukkan perubahan neraca perdagangan yang disebabkan oleh 1) VXW: perubahan ekspor, 2) vxwfob : perubahan harga

FOB, 3) VIW: perubahan impor berdasarkan harga CIF, 4) Viwcif : perubahan harga CIF, dan 5) i, r : negara atau region.

Kesejahteraan (EV)

Adapun persamaan tersebut dirumuskan dengan :

$$EV(r) = [INCOMEEV(r) / 100] * yev(r)$$

Persamaan ini menunjukkan perubahan kesejahteraan yang disebabkan oleh: 1) INCOMEEV :

perubahan pendapatan regional dan 2) yev : perubahan pendapatan rumah tangga.

Permintaan Tenaga Kerja (qfe)

Adapun persamaan tersebut dirumuskan dengan :

$$qfe(i,j,r) = -afe(i,j,r) + qva(j,r) - ESUBVA(j) * [pfe(i,j,r) - afe(i,j,r) - pva(j,r)]$$

Persamaan ini menunjukkan perubahan permintaan tenaga kerja yang disebabkan oleh: (a) qfe: perubahan permintaan kepemilikan faktor produksi/ bahan baku terkait, (b) afe : perubahan harga faktor produksi, (c) qva : perubahan permintaan faktor produksi komposit, (d) E_{SUBVA} : elastisitas substitusi dari faktor produksi berdasarkan nilai tambah, (e) pfe : perubahan harga dan permintaan faktor produksi domestik dan (f) pva : perubahan nilai tambah industri.

Simulasi dibagi atas tiga bagian yaitu (a) simulasi penghapusan tarif sesuai proposal RCEP yaitu liberalisasi 95% pos tarif nasional, (b) simulasi bagian a ditambah peningkatan produktifitas sebagai akibat peningkatan investasi sebesar 5%, dan (c) simulasi bagian b ditambah peningkatan akses bahan baku untuk industri kayu dan kertas sebesar 5%.

Analisis dalam kajian ini dikhususkan pada produk yang dibina oleh Kementerian Kehutanan. Selanjutnya, dilakukan survei kecil dan *desk study* untuk mengetahui penyebab kegagalan memaksimalkan kinerja ekspor melalui skema liberalisasi. Berdasarkan hasil

survei dan *desk study*, dilakukan simulasi untuk menguji usulan pemecahan masalah, yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait dan jika diterima akan diusulkan menjadi posisi runding sektor kehutanan untuk liberalisasi perdagangan.

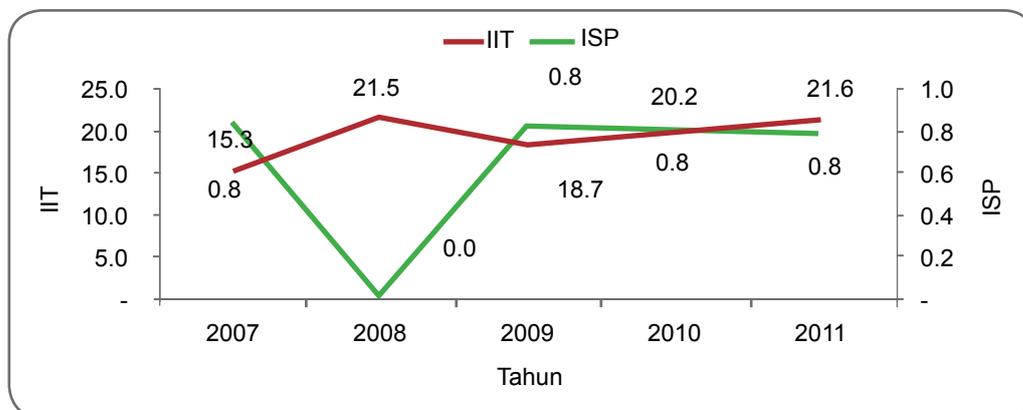
Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data perdagangan Indonesia dengan mitra dagang utama dan pasar potensial yang diperoleh dari GTAP Database, *World Integrated Trade Solution* (WITS) dari *World Bank*, UN Comtrade dan Statistik Indonesia. Data kinerja perdagangan seluruh produk kehutanan, dan olahannya terdiri dari HS 44, HS 47, dan HS 48 sebelum dan setelah liberalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Daya Saing Komoditi Kehutanan

Integrasi perdagangan Indonesia dengan dunia untuk komoditi kayu produk kehutanan masih lemah dan belum berdaya saing, sebagaimana terlihat

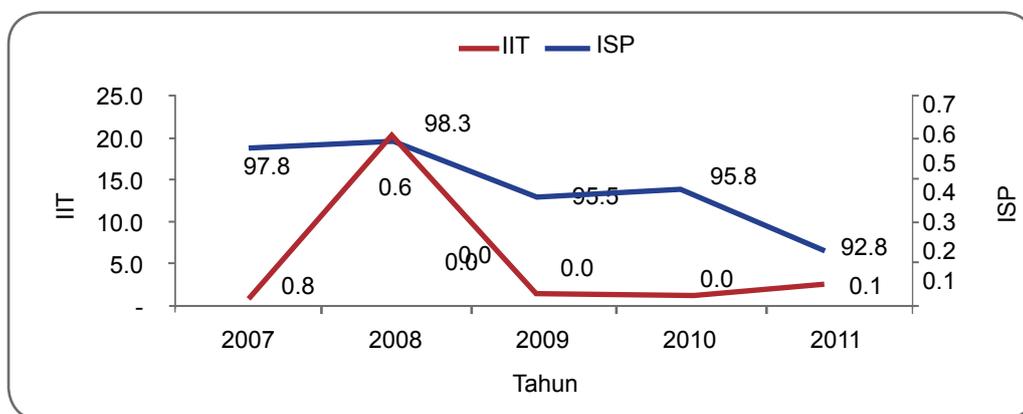


Gambar 2. Perkembangan Nilai IIT dan ISP Produk *Woods and Article of Wood* (HS 44)

Sumber : UN Comtrade (2012), diolah

dalam Gambar 2. Daya saing komoditi kayu Indonesia semakin rendah selama periode 2007-2011 dan bahkan pada tahun 2008 ketika integrasi perdagangan Indonesia mulai meningkat, daya saing

Indonesia ternyata malah turun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Indonesia semakin tergantung pada impor untuk komoditi kayu terutama untuk bahan industri kertas.



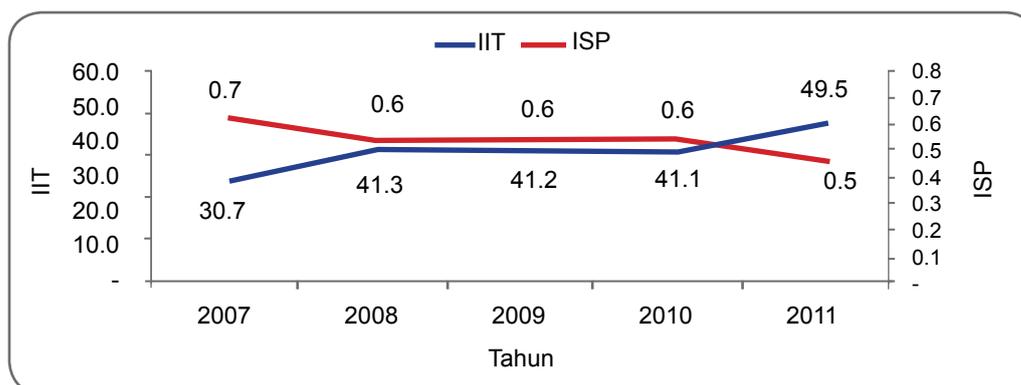
Gambar 3. Perkembangan Nilai IIT dan ISP Produk *Pulp of Wood* (HS 47)

Sumber : UN Comtrade (2012), diolah

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 3, integrasi perdagangan produk *pulp* Indonesia dengan negara mitra dagang sangat kuat selama periode 2007-2011, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan produk kayu. Akan tetapi, produk *pulp* yang diekspor tersebut masih berupa produk bahan baku dengan nilai tambah yang rendah. Peningkatan integrasi perdagangan terjadi pada tahun 2008 dan setelah itu mengalami penurunan, begitu juga dengan daya saing produk *pulp* Indonesia. Meskipun industri *pulp* merupakan industri yang prospektif, tetapi terdapat beberapa permasalahan serius yang dihadapi oleh industri *pulp* Indonesia (Rosadi, 2005). Diantara permasalahan tersebut adalah kenyataan bahwa kayu untuk

bahan baku *pulp* belum tersedia dalam jumlah yang memadai untuk kebutuhan produksi walaupun potensi yang luas ada. Kebutuhan bahan baku kayu untuk *pulp* yang dipasok dari hutan tanaman industri 5 (HTI-*pulp*) hanya dapat memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sebagian perusahaan *pulp* saja.

Masalah lain yang dihadapi oleh industri pulp Indonesia adalah semakin meningkatnya biaya untuk memproduksi *pulp*, meskipun pada periode sebelum tahun 2000-an biaya produksi tersebut relatif lebih murah (Ibnusantoso, 2000). Berdasarkan Ibnusantoso (2000), adapun penyebab peningkatan biaya produksi tersebut disebabkan oleh peningkatan harga energi, upah buruh, dan biaya transportasi (*transport cost*).



Gambar 4. Perkembangan Nilai IIT dan ISP Produk Paper and Paper Board (HS 48)

Sumber : UN Comtrade (2012), diolah

Berdasarkan data dalam Gambar 4, produk *paper and paper board* memiliki daya saing dan integrasi perdagangan yang kuat dan stabil selama periode 2007-2011 dibandingkan *produk wood and article of wood* namun masih dibawah *produk pulp of wood*. Indonesia memiliki beberapa keunggulan yang menyebabkan posisi produk *paper and paper board* sebagai industri yang paling diandalkan. Salah satu keunggulan tersebut adalah kondisi iklim Indonesia yang mendukung perkembangan industri tersebut. Dibandingkan dengan salah satu penghasil produk *paper and paper board* utama dunia, yaitu Finlandia, misalnya, negara ini membutuhkan waktu sekitar 60 tahun untuk memperoleh satu batang pohon akasia sebagai *input*, sedangkan Indonesia hanya membutuhkan waktu hanya sekitar 1 tahun.

Kinerja Perdagangan Setelah Liberalisasi

Liberalisasi perdagangan yang telah disepakati Indonesia mewajibkan setiap produk yang mendapatkan pemotongan atau penghapusan tarif untuk memenuhi kandungan produk lokal (*local content*).

Nilai ambang batas untuk kandungan lokal minimum dalam liberalisasi Indonesia umumnya 40%, yang berarti harus terdapat minimal 40% biaya produksi berasal dari belanja dalam negeri dan sisanya impor. Khusus untuk liberalisasi dengan ASEAN, Jepang dan ASEAN dengan mitra disepakati minimum kandungan lokal 40% berasal dari negara ASEAN.

Berdasarkan perbandingan data penggunaan bahan baku industri besar dan sedang dari BPS, ternyata seluruh produk kehutanan Indonesia memenuhi kriteria kandungan lokal minimal sebesar 40% (Tabel 1). Penggunaan bahan baku lokal untuk industri kehutanan nasional bervariasi antara 47,4% sampai dengan 99,8%. Industri kehutanan yang paling banyak menggunakan bahan baku impor adalah industri panel kayu, dimana bahan baku lokal sebesar 47,4% dan bahan baku impor mencapai 52,6% dari total bahan baku yang digunakan. Adapun industri dengan kandungan lokal terbesar adalah industri pengolahan rotan dengan persentase kandungan lokal mencapai 99,8%. Dengan berdasarkan temuan

ini, dapat diasumsikan seluruh produk industri kehutanan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas liberalisasi di negara mitra.

Tabel 1. Kandungan Lokal Produk Kehutanan

Produk		Nilai Lokal	Nilai Impor	Kandungan Lokal
KBLI	Deskripsi	Satuan: Rp Juta		
20101	Industri penggergajian kayu	478,618	72,853	86,8%
20104	Industri pengolahan rotan	18,800	31	99,8%
20211	Industri kayu lapis	471,313	201,414	70,1%
20212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood	1,260,164	267,108	82,5%
20213	Industri panel kayu lainnya	81,885	90,828	47,4%
20214	Industri veneer	12,868	801	94,1%
20220	Industri moulding dan komponen bahan bangunan	1,598,548	308,652	83,8%
20291	Industri anyam-anyaman dari rotan dan bambu	582	265	68,7%
20293	Industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali furnitur	100,441	41,185	70,9%
20294	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	1,123	7	99,4%
20299	Industri barang dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan ditempat lain	143,457	23,481	85,9%

Sumber : BPS (2012), diolah

Setelah pemberlakuan liberalisasi Indonesia dengan ASEAN, Australia, Cina, India, Jepang, Republik Korea, dan Selandia Baru, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tabel 2 memperlihatkan kinerja perdagangan produk *woods and article of wood* (HS 44) yang terdiri dari total 153 pos tarif dalam kriteria *Harmonized System* (HS) 10 digit berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2009 (Depkeu, 2009).

Berdasarkan data ekspor dan impor kelompok produk *Woods and Article of Wood* (HS 44) di tahun 2011, ternyata dari total 153 pos tarif dikelompok ini, hanya 35 pos tarif (22,78%) yang memperoleh surplus perdagangan di atas US \$ 1 juta, sedangkan 55 pos tarif (28,10%) memperoleh surplus dibawah

USD 1 juta. Selanjutnya terdapat 63 pos tarif (41,17%) defisit, yang terdiri dari 29 pos tarif defisit dibawah USD 1 juta, dan 34 pos tarif defisit dibawah USD 34 juta.

Hasil perhitungan dalam Tabel 2 khususnya indeks IIT mengindikasikan bahwa keterkaitan antara produk Indonesia dengan negara lain di dunia masih rendah. Hal ini ditunjukkan sangat sedikit produk kehutanan yang memperoleh surplus perdagangan memiliki nilai indeks IIT di atas 50, yang berarti keterkaitan atau daya tawar produk Indonesia untuk produk kehutanan di negara lain relatif rendah. Kasus yang sejalan dengan kondisi ini adalah penolakan ekspor produk kehutanan yang banyak dikaitkan dengan kelestarian lingkungan, antara lain oleh Uni Eropa¹.

¹ Informasi lebih lanjut dapat dibaca di Indonesia Finance (2011), edisi 21 Sept. 2011. Ekspor Kehutanan Terhambat Isu Lingkungan

Tabel 2. Kinerja Perdagangan *Woods and Article of Wood* (HS 44) Setelah Liberalisasi

Deskripsi	Satuan Tarif	Jumlah Pos Tinggi	Keterkaitan Tinggi	Spesialisasi
Surplus > USD 1 Juta	Pos Tarif	35	1	26
Surplus ≤ USD 1 Juta	Pos Tarif	55	3	24
Defisit ≤ USD 1 Juta	Pos Tarif	29	6	22
Defisit > USD 1 Juta	Pos Tarif	34	4	28

Sumber : BPS (2012), diolah

Akan tetapi, dari produk *woods and article of wood* (HS 44) yang mengalami defisit neraca perdagangan, ternyata terdapat 10 produk dengan nilai indeks IIT di atas 50, atau mengindikasikan keterkaitan industri produk impor dengan industri domestik kuat. Khusus produk kehutanan impor yang memiliki nilai indeks IIT tinggi, diusulkan untuk diliberalisasikan karena produk tersebut dibutuhkan oleh industri atau konsumen nasional.

Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) untuk *woods and article of wood*

(HS 44) menunjukkan bahwa ternyata sebagian besar produk surplus sudah terspesialisasi dengan nilai tambah tinggi. Selain itu, dari 63 pos tarif produk yang mengalami defisit, 50 pos tarif (79,4%) sudah terspesialisasi atau industri sudah mencapai tahap kematangan produk. Indeks ISP dan IIT mengindikasikan bahwa, bahan baku yang diimpor memang dibutuhkan di Indonesia, karena tidak diperoleh bahan baku sejenis dengan kualitas dan harga sama dari industri domestik.

Tabel 3. Kinerja Perdagangan *Pulp of Wood* (HS 47) Setelah Liberalisasi

Deskripsi	Satuan Tarif	Jumlah Pos Tinggi	Keterkaitan Tinggi	Spesialisasi
Surplus > USD 1 Juta	Pos Tarif	1	1	1
Surplus ≤ USD 1 Juta	Pos Tarif	5	3	3
Defisit ≤ USD 1 Juta	Pos Tarif	5	1	3
Defisit > USD 1 Juta	Pos Tarif	14	0	14

Sumber : BPS (2012), diolah

Tabel 3 memperlihatkan kinerja perdagangan produk *pulp of wood* (HS 47) setelah liberalisasi. Berdasarkan data tersebut, ternyata dari total 25 pos tarif produk *pulp of wood* (HS 47), terdapat satu pos tarif surplus di atas USD 1 juta, terdapat lima pos tarif surplus kurang dari USD 1 juta, dan

terdapat 19 pos tarif defisit, dimana 5 pos tarif defisit kurang dari USD 1 juta dan 14 pos tarif defisit lebih dari USD 1 juta. Satu pos tarif yang surplus di atas USD 1 juta adalah *chemical wood pulp, soda, other than dissolving grades, bleached, non coniferous* (HS 4703290000). Namun sayangnya berdasarkan indeks

IIT, keterkaitan produk tersebut dengan negara importir masih rendah, yang berarti daya tawar produsen produk tersebut dipasar internasional rendah.

Akan tetapi, indeks ISP mengindikasikan bahwa sebagian besar industri *pulp of wood* Indonesia sudah mapan dan mampu memproduksi produk tersebut. Namun nilai ISP tersebut tidak diikuti dengan kemampuan menjaga keterkaitan antara bahan baku *pulp of wood* Indonesia dengan pasar industri kertas dunia. Kondisi tersebut dialami produk dengan surplus perdagangan kurang dari USD 1 juta maupun 19 pos

tarif produk *Pulp of Wood* (HS 47) yang mengalami defisit.

Tabel 4 memperlihatkan kinerja *paper and paper board* (HS 48) setelah liberalisasi, dimana dari total 176 pos tarif, terdapat 46 pos tarif (25,69%) surplus di atas USD 1 juta, 15 pos tarif (8,37%) surplus kurang dari USD 1 juta, dan 119 pos tarif (66,48%) defisit, yang terdiri dari 55 pos tarif defisit kurang dari USD 1 juta dan 64 pos tarif defisit melebihi USD 1 juta. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena sebagian besar pos tarif produk *Paper and Paper Board* (HS 48) semakin defisit setelah liberalisasi.

Tabel 4. Kinerja Perdagangan *Paper and Paper Board* (HS 48) Setelah Liberalisasi

Deskripsi	Satuan Tarif	Jumlah Pos Tinggi	Keterkaitan Tinggi	Spesialisasi
Surplus > USD 1 Juta	Pos Tarif	46	10	22
Surplus ≤ USD 1 Juta	Pos Tarif	15	7	3
Defisit ≤ USD 1 Juta	Pos Tarif	55	7	38
Defisit > USD 1 Juta	Pos Tarif	64	10	43

Sumber : BPS (2012), diolah

Indeks IIT memperlihatkan bahwa produk dengan keterkaitan industri tinggi hanya 10 dari 46 pos tarif yang surplus di atas USD 1 juta, dan hanya 7 pos tarif dari total 15 pos tarif yang memperoleh surplus kurang dari USD 1 juta. Kondisi ini semakin buruk untuk produk yang mengalami defisit, dimana untuk 119 pos tarif yang defisit, hanya 17 pos tarif memiliki keterkaitan industri tinggi.

Rendahnya keterkaitan perdagangan antar industri nasional dengan negara mitra untuk produk *pulp* dan *paper* disebabkan oleh rendahnya daya saing nasional, meskipun Indonesia dapat memproduksi produk tersebut. Indeks ISP memperlihatkan bahwa dari total

176 pos tarif *paper and paper board* (HS 48), hanya terdapat 63 pos tarif yang memiliki kinerja perdagangan baik, namun 113 pos tarif lain sebaliknya.

Kondisi daya saing produk *pulp* dan kertas Indonesia di era liberalisasi sangat berbeda dengan kondisi diakhir tahun 1990. Menurut Wiranta (1997), pada periode 1990an, industri *pulp dan paper* nasional sangat kuat dan berdaya saing, disebabkan oleh serangkaian kebijakan pemerintah berupa pemberian izin membangun Hutan Tanaman Industri (HTI) dan peningkatan jumlah pabrik. Kondisi ini menyebabkan peningkatan industri *pulp*, ekspor dan peluang bagi calon investor swasta untuk mendirikan

pabrik *pulp*. Jika tidak dilakukan kembali kebijakan tersebut di atas, diyakini daya saing industri *pulp* dan kertas Indonesia tidak mungkin kembali seperti periode 1990-an.

Prediksi Dampak Liberalisasi

Hasil simulasi dalam Tabel 5 menunjukkan perubahan neraca perdagangan produk kayu dan kertas² untuk Indonesia, Australia-Selandia Baru, Cina, Jepang, Republik Korea, India, dan negara ASEAN Lainnya.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa dalam ketiga alternatif simulasi, total kinerja perdagangan Indonesia selalu berkurang, tidak sebaik hasil yang diperoleh Jepang dan Republik Korea. Hal ini disebabkan Indonesia banyak mengimpor produk konsumsi (produk jadi) dan hanya mengekspor produk bahan baku. Saat ini sudah disadari bahwa ekspor Indonesia yang bergantung pada bahan baku menjadi penyebab utama defisit neraca perdagangan nasional³.

Tabel 5. Simulasi Liberalisasi dan Dampaknya Terhadap Neraca Perdagangan

Satuan: USD Juta	Indonesia	Australia-Selandia Baru	Cina	Jepang	Rep. Korea	India	ASEAN lain
A. Liberalisasi RCEP							
Kayu dan Kertas	(144.57)	(10.12)	(495.86)	86.23	74.17	(89.89)	(268.49)
Seluruh Sektor	(1,511.04)	(92.63)	(1,854.80)	487.78	343.04	(1,597.59)	(2,806.22)
B. Liberalisasi RCEP dan Peningkatan Produktifitas 5%							
Kayu dan Kertas	(47.08)	(24.23)	(568.22)	48.28	59.45	(95.18)	(87.81)
Seluruh Sektor	(2,352.42)	(105.80)	(1,934.66)	614.68	333.19	(1,624.79)	(4,368.78)
C. Liberalisasi RCEP, Peningkatan Produktifitas 5% dan Peningkatan Pasokan Bahan Baku 5% Untuk Kayu dan Kertas							
Kayu dan Kertas	1,060.21	(146.73)	(1,036.60)	(299.83)	(94.75)	(142.39)	1,968.97
Seluruh Sektor	(2,426.55)	(89.93)	(1,929.42)	508.20	330.08	(1,611.60)	(4,506.44)

Sumber : GTAP GMig2 (2012), diolah

Hasil simulasi dalam Tabel 6 memperlihatkan perubahan kesejahteraan yang diperoleh dari peningkatan konsumsi rumah tangga sebagai akibat meningkatnya pendapatan regional. Terlihat bahwa kesejahteraan penduduk Indonesia semakin meningkat jika Indonesia ikut serta dalam liberalisasi

RCEP. Lebih lanjut, kesejahteraan tersebut semakin meningkat ketika pelaksanaan liberalisasi diikuti dengan peningkatan produktivitas dan kemudahan memperoleh bahan baku. Peningkatan kesejahteraan Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan kesejahteraan negara ASEAN Lainnya.

²Model GTAP Gmig 2 hanya memiliki sektor kehutanan untuk industri kayu dan kertas.

³Puska Daglu (2012). Belum pulihnya ekonomi global menghambat akselerasi pemulihan ekspor nasional.

Meningkatnya kesejahteraan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penggunaan tenaga kerja domestik. Tabel 6 juga menunjukkan bahwa liberalisasi RCEP, meningkatnya produktivitas dan penggunaan bahan baku mendorong meningkatnya produksi Indonesia dan

penyerapan tenaga kerja baik bagi industri kayu dan kertas maupun bagi seluruh sektor di Indonesia. Kondisi serupa terjadi untuk negara ASEAN lainnya, Australia-Selandia Baru, Cina, dan India. Jepang dan Republik Korea mengalami keadaan yang sebaliknya.

Tabel 6. Simulasi Liberalisasi dan Dampaknya Terhadap Perubahan Kesejahteraan

Satuan: USD Juta	Indonesia	Australia- Selandia Baru	Cina	Jepang	Rep. Korea	India	ASEAN lain
A. Liberalisasi RCEP	2,650.72	(21.63)	(616.73)	321.81	(1,509.27)	(842.88)	8,835.72
B. Liberalisasi RCEP dan 5% Peningkatan Produktifitas	37,959.65	43.15	(452.93)	809.73	(1,336.72)	(120.83)	(754.13)
C. Liberalisasi RCEP, Peningkatan Produktifitas 5% dan Peningkatan Pasokan Bahan Baku 5% Untuk Kayu dan Kertas	39,146.96	44.29	(397.84)	925.06	(1,302.71)	(119.41)	(754.69)

Sumber : GTAP GMig2 (2012), diolah

Turunnya produksi nasional di Jepang menyebabkan turunnya penggunaan tenaga kerja, namun di sisi lain liberalisasi menyebabkan konsumen memperoleh alternatif barang konsumsi murah sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Namun, untuk Republik Korea, turunnya produksi nasional menyebabkan turunnya penyerapan tenaga kerja dan langsung mengurangi kemampuan belanja rumah tangga, sehingga kesejahteraan mereka berkurang dibandingkan sebelum liberalisasi.

Usulan Posisi Runding Produk Kehutanan

Tabel 7 memperlihatkan produk kehutanan yang dibina oleh Kementerian

Kehutanan, seluruhnya terdapat 127 pos tarif dalam HS 10 digit, menurut BTBMI 2009. Berdasarkan kinerja produk tersebut di tahun 2011, ternyata sebanyak 17 pos tarif mengalami surplus di atas USD 1 juta, 17 pos tarif surplus kurang dari USD 1 juta, 32 pos tarif defisit kurang dari USD 1 juta dan 30 pos tarif defisit melebihi USD 1 juta. Selain itu terdapat 31 pos tarif yang tidak ditemukan data perdagangannya, baik ekspor maupun impor, sebagian besar merupakan produk kayu log.

Indeks IIT dalam Tabel 8 memperlihatkan keterkaitan industri untuk pos tarif yang surplus ternyata relatif rendah, meskipun berdasarkan indeks ISP, Indonesia mampu memproduksi produk tersebut. Indeks

tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia semakin kehilangan pasar khusus untuk produk yang sebelumnya merupakan andalan ekspor Indonesia. Semakin turunnya kinerja ekspor tersebut disebabkan oleh berkurangnya pesanan

mebel dan *plywood* dari luar negeri akibat krisis global, serta peningkatan biaya dan prosedur pengiriman akibat pemberlakuan kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)⁴.

Tabel 7. Kinerja Perdagangan Produk yang Dibina Kementerian Kehutanan

Deskripsi	Surplus > USD 1 Juta	Surplus < USD 1 Juta	Defisit < USD 1 Juta	Defisit > USD 1 Juta	Mendekati 0*
Pos Tarif (Total 127)	17 pos tarif	17 pos tarif	32 pos tarif	30 pos tarif	31 pos tarif
Keterkaitan Industri					
IIT > 50	0 pos tarif	0 pos tarif	7 pos tarif	4 pos tarif	
IIT < 50	17 pos tarif	17 pos tarif	25 pos tarif	26 pos tarif	
Spesialisasi Produk					
ISP > 0.8	14 pos tarif	16 pos tarif	0 pos tarif	0 pos tarif	
ISP 0 - 0.8	3 pos tarif	1 pos tarif	0 pos tarif	0 pos tarif	
ISP < 0	0 pos tarif	0 pos tarif	32 pos tarif	30 pos tarif	

Sumber : BPS (2012), diolah

Sebaliknya untuk produk binaan Kementerian Kehutanan yang defisit di tahun 2011, sebanyak 62 pos tarif memiliki keterkaitan industri rendah dan hampir tidak diproduksi didalam negeri, sebagaimana terlihat dalam nilai indeks IIT dan ISP. Produk binaan yang defisit neraca perdagangan, dengan nilai ISP negatif namun memiliki indeks

IIT di atas 50, mengindikasikan bahwa produk tersebut banyak digunakan oleh industri pengolahan kayu di Indonesia. Khusus untuk produk dengan kriteria ini diusulkan untuk diliberalisasi sebagai upaya membantu industri kehutanan nasional memperoleh bahan baku murah. Adapun hasil selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8. Usulan Posisi Runding Kementerian Kehutanan

Deskripsi	Jumlah Pos Tarif	Posisi
Dibina Kementerian Kehutanan	127	Sudah diliberalisasi
Usulan Posisi:		
1. Surplus	34	Liberalisasi
2. Defisit	62	
a. Bahan Baku*	13	Liberalisasi
b. Bukan Bahan Baku	49	Trade Remedies*
3. Tidak ada data perdagangan	31	Liberalisasi

Sumber : BTBMI (2009), BPS (2012), diolah

Keterangan : * Pemberlakuan *trade remedies* jika pengusaha dan *stakeholders* setuju

⁴ Hidayat, Januari 2012. Ekspor produk kayu turun.

Selanjutnya, sesuai dengan Tabel 8, produk binaan yang defisit dengan memiliki nilai ISP negatif dan indeks IIT di bawah 50, mengindikasikan bahwa produk tersebut tidak efisien di produksi di Indonesia, dan bukan menjadi bahan baku untuk produk yang dibina oleh Kementerian Kehutanan. Khusus untuk produk seperti ini, diusulkan dilakukan kebijakan *trade remedies* yang meliputi kebijakan *safeguard* atau *anti dumping*. Kemudian, untuk produk yang diharapkan memperoleh *trade remedies* diusulkan menjadi *sensitive list* bagi Kementerian Kehutanan. Adapun untuk produk yang meraih surplus perdagangan dapat tetap diliberalisasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan Indeks IIT dan ISP, produk kehutanan yang memiliki daya saing adalah *pulp of wood*, jauh diatas daya saing produk *paper and paper board* serta *woods and article of wood*. Hasil simulasi dengan GTAP GMig 2 juga mengindikasikan bahwa keterbatasan

bahan baku menjadi penyebab utama Indonesia gagal memanfaatkan liberalisasi perdagangan.

Produk kehutanan yang dibina Kementerian Kehutanan mencapai 127 pos tarif, namun hanya 34 pos tarif yang surplus perdagangan, 62 pos tarif defisit dan 31 pos tarif tidak ditemukan data perdagangannya. Sebanyak 13 pos tarif dari 62 pos tarif defisit merupakan bahan baku yang banyak digunakan industri kehutanan nasional.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dirumuskan usulan posisi runding produk kehutanan sebagai berikut: (a) Untuk seluruh pos tarif yang surplus semenjak liberalisasi sebaiknya diusulkan untuk tetap diliberalisasi dan menjadi produk ekspor utama dari Kementerian Kehutanan, (b) Untuk 13 pos tarif yang menjadi bahan baku utama industri nasional sebaiknya tetap diliberalisasi meskipun defisit, (c) Untuk 49 pos tarif yang defisit dan tidak menjadi bahan baku utama industri nasional sebaiknya diberlakukan *trade remedies* dan dijadikan produk sensitif dari Kementerian Kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armington, P.A. (1969). A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production. *International Monetary Fund Staff Papers*, 16 (5): 159-78.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Ekspor Impor Indonesia*. Jakarta: BPS
- Chirathivat, S. (2002). ASEAN-China Free Trade Area: Background, Implications and Future Development. *Journal of Asian Economics* 13 (5): 671-86.
- Depkeu. (2009). *Buku Tarif Bea Masuk Indonesia* (BTBMI). Diunduh 22 November 2012 dari www.tarif.depkeu.go.id/tarif/?menu=info...book.

Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, (2012). Penguatan Kelembagaan Masyarakat Untuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Makalah Seminar, disampaikan pada acara Retreat Perdagangan Internasional, Bandung, 4 - 5 Oktober 2012.

Departemen Kehutanan dan ITTO. (2005). *Sintesis: Restrukturisasi dan Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia*. EC Asia Pro Eco Program. Diunduh 3 Desember 2012 dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/research/governance/foresttrade/Jakarta/Attachment36-Sarsito-JakartaWshop011205-1000-1020.pdf

- Harvie, C dan Lee. (2003). Export Led Industrialisation and Growth – Korea’s Economic Miracle 1962-89. *Economics Working Paper Series 2003*. University of Wollongong.
- Hertel. (1997). *Global Trade Analysis, Modeling and Applications*. New York: Cambridge University Press.
- Hidayat, S.N. (2012). Ekspor Produk Kayu Turun. Diunduh 6 Januari 2012 dari <http://industri.kontan.co.id/news/ekspor-produk-kayu-turun>.
- Ibnusantoso G. (2000). *Kemandegan Pengembangan Minyak Atsiri Indonesia [abstrak]*. Di dalam: Seminar Pengusahaan Minyak Atsiri Hutan Indonesia; Bogor, 23 Mei 2000. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB Dramaga.
- Indonesia Finance. (2011, 21 September). Ekspor Kehutanan Terhambat Isu Lingkungan. Diunduh 9 Januari 2013 dari <http://old.indonesiainancetoday.com/read/14809/contact>.
- Kementerian Perdagangan. (2012). Indeks Spesialisasi Perdagangan. Diunduh 5 Agustus 2012 dari http://www.kemendag.go.id/addon/depdag_isp.
- Kementerian Perindustrian. (2011). Ekspor dan Impor. Diunduh 8 Maret 2011 dari <http://www.kemenperin.go.id/Ind/Statistik/Indikator/exim.aspx>.
- Kim, J.K., D.S. Sang, dan I.K. Jun. (1995). *The Role of the Government in Promoting Industrialization and Human Capital Accumulation in Korea*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lubis, A. D., et al. (2011). *Analisis Kepentingan Indonesia Dalam Usulan Liberalisasi Produk Elektronik*. Jakarta: Puska KPI, BPPKP.
- Ogujiuba, Nwogwugwu, dan Dike. (2011). Import Substitution Industrialization as Learning Process: Sub Saharan African Experience as Distortion of the “Good” Business Model. *Business and Management Review* Vol. 1(6) pp. 08-21.
- Park, et, al. (2008). Prospects of an ASEAN– People’s Republic of China Free Trade Area: A Qualitative and Quantitative Analysis. *Economics Working Paper Series* No. 30, Asian Development Bank.
- Puska Daglu. (2012). *Belum Pulihnya Ekonomi Global Menghambat Akselerasi Pemulihan Ekspor Nasional*. Jakarta: BPPKP, Kementerian Perdagangan.
- Rosadi, A.H.Y. (2005). Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pulp Indonesia. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Diunduh tanggal 13 Desember 2012 dari <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/182/2005ahy.pdf>.
- Sugiyono, A. (2009). Dampak Kebijakan Energi Terhadap Perekonomian Di Indonesia : Model Komputasi Keseimbangan Umum. Kolokium Seminar Doktor, UGM. Diunduh 6 Juni 2013 dari <http://sugiyono.webs.com/paper/p0902.pdf>.
- UN Comtrade. (2012). United Nations Commodity Trade Statistics Database. Diunduh 9 Agustus 2012 dari <http://comtrade.un.org/>
- Walmsley, T.L., Winters, L.A., and Ahmed, A.A. (2007). Measuring the Impact of the Movement of Labor Using a Model of Bilateral Migration Flows. GTAP Technical Paper no 28. Diunduh 20 Desember 2012 dari www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/5663.pdf.
- Wiranta, S. (1997). Daya Saing Dan Prospek Komoditas Pulp Dan Kertas Indonesia. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta. Diunduh 5 Desember 2012 dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=20238&idc=72>.
- World Bank. (2012). World Integrated Trade Solution (WITS). Diunduh 3 November 2012 dari <http://www.wits.worldbank.org>.